Peningkatan Sumber Pendapatan dan Penghasilan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

(Seminar Umum di Kelurahan Matawolot, Kabupaten Sorong, Papua Barat)

A. Sakti R.S. Rakia¹, Kristi W. Simanjuntak²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.

email : saktialwiyah@um-sorong.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.

email : kristiwarista98@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Nawakerja Prioritas Kabinet Kerja Pemerintah, terdapat 9 (Sembilan) program yang hendak dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang diantaranya menyangkut program pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/BUMDes). Hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa dengan memberi “lokomotif baru” yang dapat menggerakkan perekonomian desa, manakala peran swasta dan koperasi tidak terlalu dominan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang berkembang dan merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Peran penting BUMDes bukan hanya diharapkan sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, akan tetapi juga sebagai penyumbang besar dalam perekonomian desa.

Keyword : Desa; Badan Usaha Milik Desa; Hukum Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah pengaturan desa sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga awal tahun 2014 mengalami pasang surut dan dinamika politik, yang mengakibatkan eksistensi desa menjadi terpinggirkan. Padahal dalam Penjelasan UUD 1945 menguraikan tentang eksistensi atau keberadaan desa, yaitu :

“Dalam territorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya, daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa...”

Di masa rezim Orde baru, pengaturan tentang desa diatur dalam UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, akan tetapi dalam undang-undang ini seluruh desa di Indonesia

diseragamkan atau diformat mengikuti struktur desa seperti yang ada di wilayah Jawa. Penyeragaman ini lambat laun mengakibatkan eksistensi masyarakat hukum adat yang sudah eksis dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dan telah ada jauh sebelum kemerdekaan mengalami reduksi yang luar biasa.

Ketika rezim Orde Baru jatuh akibat tuntutan reformasi yang ditandai dengan dilakukan Amendemen terhadap UUD 1945, momentum untuk melakukan rekonstruksi tentang pengaturan desa kembali terbuka. Hanya saja, eksistensi desa dan kesatuan masyarakat hukum adat diletakkan menjadi bagian integral dari wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota yang pengaturannya disatukan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 eksistensi desa menjadi “hilang”, dan yang diakui hanyalah “...kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2014 lahir UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), dimana dalam undang-undang ini eksistensi desa dan desa adat diakomodir atau diakui, walaupun pada dasarnya dalam suatu Negara kesatuan yang sarat dengan ciri homogenitas, tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Ni'matul Huda, 2015).

Tentang pengertian desa sendiri terdapat beberapa terminologi yang diuraikan oleh para ahli dalam usaha memberi definisi atau pengertian tentang desa. Istilah untuk penyebutan desa di Indonesia cukup beragam seperti, desa, dusun, nagari, gampong, kampong, dan sebagainya. Dari segi istilah, perkataan desa, dusun, desi, berasal dari kata swadesi, sama halnya dengan Negara, negeri, nagari, negari, negory, berasal dari kata *nagarom*, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984:15). Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pendukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dsb), tanah hutan dan tanah belukar.

Dalam pada itu, menurut Mashuri Maschab (2013:1-2), ketika membicarakan desa di Indonesia, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) penafsiran atau pengertian tentang desa, yaitu ;

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, yaitu desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Eksistensi desa sebagai suatu “kesatuan masyarakat hukum”, terdapat pula realitas kesatuan masyarakat yang eksis dengan sebutan “masyarakat hukum adat” dengan hak asal usul yang lebih dominan (desa adat) daripada hak asal-usul desa dalam pengertian “kesatuan masyarakat hukum”. Masyarakat Hukum Adat oleh Hazairin (1986:11) disebutkan sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria No. 55 tahun 1999, Masyarakat Hukum Adat adalah suatu masyarakat yang menjadi subyek atau penganut dari hukum kebiasaan yang berlaku terhadap sekelompok masyarakat dalam bidang-bidang tertentu, baik menyangkut harta benda maupun hal-hal yang non benda (Panggabean, 2011:5). Eksistensi masyarakat hukum adat dituangkan ke dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Masyarakat hukum adat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu, suatu masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat

istiadat seperti *desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij* dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri (Bagir Manan, 2001:13).

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota (Ni'matul Huda, *Op.cit*). kesederajatan ini mengandung makna, kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI yang maju, sejahtera dan modern. Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, justru mengandung tuntutan pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem NKRI yang maju dan modern.

Pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat telah diakomodir dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ditegaskan :

- 1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dan berhak :
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 tahun 2004, yang menyebutkan:

“dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya”.

Baik desa ataupun desa adat, diatur dalam UU Desa. Pasal 1 angka 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa, terlihat bahwa undang-undang ini tidak membedakan terminologi desa dan desa adat.

Desa, dengan kewenangannya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, dalam UU Desa disebutkan bahwa tujuan pengaturan dan penataan desa didasari oleh beberapa hal, termasuk masalah kesejahteraan desa di bidang perekonomian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf H UU Desa, disebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan “memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian, dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analistis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pendapatan dan Penghasilan Desa

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pengaturan tentang desa menurut Pasal 4 huruf H UU Desa, salah satunya adalah dimaksudkan untuk tujuan “memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional”. Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 71 UU Desa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya pada Pasal 72 angka 1 UU Desa, pendapatan Desa bersumber dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam Penjelasan UU Desa, mengenai Pasal 72 angka 1 huruf a, yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil dari BUM desa dan tanah bengkok.

Sumber pendapat desa lainnya yaitu alokasi APBN (Pasal 72 angka 1 huruf b) adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desat Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sementara itu, adapun yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” (pasal 72 angka 1 huruf g) adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa, selanjutnya disebut BUMDes), pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Dalam Pasal 95 PP No. 43 tahun 2014, ditegaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa).

Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, ada 2 (dua) tahap penyaluran dana desa sebelum diterima desa masing-masing. Anggaran desa sebesar Rp. 20 triliun pada RAPBN perubahan 2015 akan ditransfer langsung Kemenkeu kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, bupati/walikota melakukan pembagian dana tersebut ke desa-desa, yang mekanisme penyaluran dana tersebut sesuai dengan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP No. 60 tahun 2014 mengatur bahwa, dana desa disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukn dari RKUD ke rekening desa setelah APB Desa ditetapkan. Kepala Daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian dana desa tersebut (Ni'matul Huda, *Op,cit*).

Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel tentang penyaluran dana desa sebagai berikut :

Kementerian Keuangan (Rekening Kas Umum Negara) Rp. 20 triliun	Tahapan : Pertama – 40% April Kedua – 40% Agustus Ketiga – 20% November
Pemerintah kabupaten/kota (Rekening Kas Umum Daerah) 508 kabupaten/kota	Persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> - RKUN ditransfer ke RKUD dengan syarat adanya peraturan bupati/walikota tentang tata cara pembagian dana desa dan adanya pengesahan APBD - Desa mendapat pencairan setelah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Desa/kas Desa 74.000 Desa Rata-rata per Desa : Rp. 240 s/d Rp. 270 juta	Formula Menghitung ADD <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk desa; - Luas wilayah desa; - Angka kemiskinan desa;

	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesulitan geografis desa. <p>Penggunaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan - Prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
--	---

Pasal 96 PP No. 43 tahun 2014 menentukan bahwa, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAU). Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota (*ibid*).

Selanjutnya di dalam Pasal 97 ditentukan, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan restribusi dari daerah masing-masing.

Perhatikan tabel penerimaan dana desa berikut.

Jumlah Desa	Sumber Dana Desa	Besaran Dana
72.994 buah Total anggaran dana desa Rp. 9,066 triliun	APBN : <ul style="list-style-type: none"> - Bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah - Dana perimbangan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 10% dari pajak dan restribusi daerah - Minimal 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota setelah dikurangi DAU

Seluruh pendapat desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Sumber Pendapatan Desa.

Berdasarkan Nawakerja Prioritas Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019), terdapat 9 (Sembilan) program yang hendak dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kompas, 2014), yang diantaranya menyangkut program pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/BUMDes). Hal ini dapat dikatakan sebagai kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa dengan memberi “lokomotif baru” yang dapat menggerakkan perekonomian desa, manakala peran swasta dan koperasi tidak terlalu dominan.

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang berkembang dan merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.

Keinginan untuk menjadikan BUMDes sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa, tentu tidak saja akan mendorong pengembangan BUMDes itu sendiri, tetapi juga menjadikan BUMDes sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan desa, daerah, dan bahkan pembangunan nasional. Peran penting BUMDes bukan hanya diharapkan sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, akan tetapi juga sebagai penyumbang besar dalam perekonomian desa. Bahkan BUMDes dapat saja menjadi “juru selamat” untuk keluar dari krisis ekonomi desa, sekaligus menjadi motor penggerak roda perekonomian desa ketika usaha sewaktu-waktu swasta tidak lagi dominan akibat krisis.

Peran penting BUMDes sebagai salah satu aset desa yang diharapkan produktif untuk mengembangkan perekonomian desa, dibentuk dari pemikiran tentang bagaimana agar suatu badan usaha yang tidak diselenggarakan secara monopolistik. Sesuai dengan amanah konstitusi bahwa cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dilengkapi dengan ketentuan pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara gotong royong yang menjadi khas perilaku masyarakat desa.

Dengan kedudukan BUMDes seperti yang disinggung diatas, dimana pemerintah mencanangkan program pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDes, menunjukan bahwa BUMDes merupakan salah satu faktor ekonomi yang cukup menonjol sifatnya. Terlebih lagi dalam menjalankan peranannya sebagai badan usaha yang memegang monopoli penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting bagi desa dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, maka kemampuan dan kinerja BUMDes menjadi tumpuan harapan tidak hanya untuk dapat menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan berdaya saing di pasar, akan tetapi juga menjadi pendorong bagi sektor ekonomi desa lainnya untuk bangkit melalui program kemitraan usaha maupun sebagai penghasil laba atau keuntungan bagi desa.

Dalam Pasal 87 UU Desa, ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Organisasi pengelolaan BUMDes paling sedikit terdiri atas, (i) penasihat; dan (ii) pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksanaoperasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Pasal 132,133,134 PP No. 43/14).

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Model BUMDes terdiri atas, (i) penyertaan modal desa; dan (ii) penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa berasal dari APB Desa dan sumber lain. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari, (i) dana segar; (ii) bantuan pemerintah; (iii) bantuan pemerintah daerah; dan (iv) aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

SIMPULAN

Sebagai sebuah “lokomotif baru”, BUMDes diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang selama ini dinilai masih belum memberikan kesejahteraan bagi struktur pemerintahan desa serta dapat memberikan manfaat praktis untuk masyarakat desa. Ke depan dapat diprediksi bahwa peningkatan dana desa akan bertambah, yang pada akhirnya membawa konsekuensi logis bahwa penataan struktur desa serta aparat-aparat desa mesti ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1999, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ni’matul Huda, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang Jawa Timur.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *et.al*, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institut for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa